Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI

Yaumul Refianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
yaumulrefianti19@gmail.com

Abstract—Currently, Islamic Financial Institutions in Indonesia offers products in the form of buying and selling gold on a non-cash basis. In the hadith, there is a prohibition related to buying and selling gold in cash. If done not the same amount, and not in cash. This is contrary to the opinion of the scholar Ibn Qayyim. Ibn Qayyim's view became the basis for the DSN-MUI fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 which allowed non-cash gold buying and selling transactions. The purpose of this study is to examine the method of ijthad Ibn Qayyim in determining the law? What is the view of Ibn Qayyim regarding the sale and purchase of gold in cash? How is the relevance of Ibn Qayyim's view to the DSN-MUI fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010. This study uses a qualitative research method with a character study approach. The data source used in this study used secondary data, namely the book by Ibn Qayyim I'lam Muwaqqi'in along with the translation of I'lam Muwqqi'in. Then the data were analyzed using content analysis techniques. The results of this study are that Ibn Qayyim in his ijthad refers to the Qur'an and Sunnah, then the fatwas of friends and tabi'in. The ijthad method used by Ibn Qayyim is the ijma method, qiyas, masalah mursalah, istishab, urf and az-zari'ah. The relevance between Ibn Qayyim's view and the fatwa of DSN-MUI Number 77/DSN-MUI/V/2010 is that there is a similarity in determining illat.

Keywords—*Buying and Selling Gold, Not Cash, Ibn Qayyim's View.*

Abstrak—Saat ini Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menawarkan produk dalam bentuk jual beli emas secara tidak tunai. Dalam hadis terdapat larangan terkait transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Apabila dilakukan tidak sama jumlahnya, dan tidak secara tunai. Hal ini bersebrangan dengan pendapat ulama Ibnu Qayyim. Pandangan Ibnu Qayyim ini menjadi landasan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang membolehkan transaksi jual beli emas tidak tunai. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji metode ijthad Ibnu Qayyim dalam penetapan hukum? Bagaimana pandangan Ibnu Qayyim terkait jual beli emas secara tidak tunai? Bagaimana relevansi pandangan Ibnu Qayyim dengan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi tokoh. Sumber data digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu kitab karya Ibnu Qayyim I'lam Muwaqqi'in beserta kitab terjemahan I'lam Muwqqi'in. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis content. Hasil penelitian ini adalah Ibnu Qayyim dalam ijthadnya merujuk pada Alquran dan Sunnah, kemudian fatwa-fatwa sahabat dan

tabi'in. Metode ijthad yang digunakan Ibnu Qayyim yakni metode ijma, qiyas, masalah mursalah, istishab, urf dan az-zari'ah. Relevansi antara pandangan Ibnu Qayyim dengan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yaitu adanya kesamaan penentuan illat.

Kata Kunci—*Jual Beli Emas, Tidak Tunai, Pandangan Ibnu Qayyim*

I. PENDAHULUAN

Saat ini emas merupakan salah satu aset yang diminati oleh masyarakat. Di tengah kondisi covid19, ketika nilai rupiah mengalami penurunan masyarakat memilih emas sebagai aset untuk berinvestasi. Hal ini menjadi peluang bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia untuk menawarkan produk dalam bentuk jual beli emas secara tidak tunai (*taqsih*). Produk ini memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin membeli emas dimana pembayaran dilakukan secara tidak tunai atau angsur.

Kegiatan transaksi jual beli dalam Islam memiliki aturan dan ketentuan tersendiri, yang berlandaskan Alquran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Aturan dan ketentuan tersebut mengatur rukun, syarat, dan macam-macam jual beli yang diperbolehkan agar terhindar dari unsur riba. Riba merupakan penambahan pokok suatu pinjaman yang lebih dikenal masyarakat umum dengan bunga. Dalil yang menjadi landasan atas keharaman riba pada Alquran sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah {2}: 198)

Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang yang melakukan praktik riba jiwanya akan mengalami goncangan dan tidak tenang seperti orang yang akalnya rusak oleh setan karena gila. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya larangan terhadap riba.

Hukum terkait produk jual beli emas secara tidak tunai masih menjadi polemik di kalangan para ulama. Beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait penentuan illat yang ada pada transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Merujuk pada hadis Rasulullah SAW terkait larangan riba :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.

Jumhur ulama memahami berdasarkan hadis di atas bahwa *al-amwal al-ribawiyat* (benda-benda *ribawi*) terdiri dari enam benda termasuk emas dan perak. Jika dilakukan jual beli atau pertukaran pada dua benda *ribawi* dengan jenis yang sama maka disyaratkan harus sama jumlah dan penyerahan dilakukan tunai. Jika syarat dalam pertukaran tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual beli mengandung unsur riba.

Jumhur Ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah memiliki pandangan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai tidak diperbolehkan. Pandangan tersebut didasarkan karena benda-benda riba tidak hanya berlaku pada enam macam benda yang disebutkan dalam hadis di atas saja, tetapi mereka mengkiaskan pada benda lain yang memiliki illat yang sama. Jumhur Ulama berpandangan illat yang dimiliki emas merupakan *atsman* (alat tukar menukar), oleh karena itu seluruh jenis alat tukar menukar merupakan salah satu dari benda *ribawi*, seperti uang logam dan uang kertas yang berlaku sebagai alat transaksi saat ini.

Pendapat tersebut bersebrangan dengan pandangan seorang cendekiawan muslim juga pakar fikih, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berpendapat bahwa hukum jual beli emas melalui pembayaran secara angsur adalah boleh (*mubah*).

Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini juga dijadikan landasan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang membuat Undang-undang sebagai pedoman ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dalam membuat dan menetapkan fatwa fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana metode Ijtihad yang digunakan Ibnu Qayyim?”, “Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang jual beli emas secara tidak tunai? dan “Bagaimana relevansi pendapat Ibnu Qayyim dengan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb

1. Untuk mengetahui metode Ijtihad Ibnu Qayyim dalam penetapan hukum jual beli emas segar tidak tunai.
2. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Qayyim terhadap jual beli emas tidak tunai.
3. Untuk mengetahui relevansi pandangan Ibnu Qayyim Al Jauziyah terhadap jual beli emas tidak tunai dengan fatwa DSN MUI.

II. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi tokoh. Sumber data digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu kitab karya Ibnu Qayyim I'lam Muwaqqi'in beserta kitab terjemahan I'lam Muwaqqi'in buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, internet, dan fatwa DSN-MUI. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis content.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Metode Ijtihad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merupakan salah satu mujtahid yang senantiasa menggunakan dalil-dalil *shahih* dalam setiap metodologi penulisan kitab-kitabnya. Beliau merupakan ulama yang tidak fanatik terhadap mazhabnya. Dalam pandangannya, segala penelitian harus bersifat obyektif dan mengacu pada dalil yang jelas sumber rujukannya.

Ibnu Qayyim menggunakan metode tersendiri dalam menghadapi suatu kasus atau masalah yang baru. Pertama, beliau merujuk pada Alquran dan Sunnah, kemudian bila tidak ada nash yang jelas dalam Alquran dan sunnah beliau mengambil fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Terkadang beliau juga mengambil pendapat para imam fikih. Dalam kondisi demikian, Ibnu Qayyim akan mengambil pendapat yang paling dekat dengan Alquran dan Sunnah meskipun pendapat tersebut tidak sesuai dengan mazhab fikihnya. Dengan metode inilah terjadi ikatan yang kuat anatar fikih dengan Alquran dan Sunnah. Metode inilah yang menyelaraskan *ijtihad* dalam masalah-masalah fikih. Metode yang Ibnu Qayyim gunakan dalam melakukan *ijtihad* terbagi menjadi enam macam yaitu Ijma, Qiyas, Istiashab, Maslahah Mursalah, Urf, Sadd Adz-Dzariah. Dalam *ijtihadnya* Ibnu Qayyim tidak menggunakan Istihsan karena metode ini hanya mendasarkan daya pikir tanpa dalil syara.

Pandangan Ibnu Qayyim Terhadap Jual Beli Emas Tidak Tunai

Beliau berpendapat bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai saat ini hukumnya boleh (mubah). Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya I'lam Muwaqin :

أَنَّ الْجَلِيَّةَ الْمُبَاخَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاخَةِ مِنْ جِنْسِ التِّيَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا الرِّكَاءَةُ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ الصَّنَاعَةَ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأُعِدَّتْ لِلتِّجَارَةِ، فَلَا مَحْذُورَ فِي بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا

“Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjual belikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”

Kebolehan jual beli emas secara tidak tunai atau tangguh menurut pandangan Ibnu Qayyim ini didasarkan pada alasan berikut :

1. Pertama, emas saat ini merupakan perhiasan bukan lagi mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi. Sehingga status emas berubah menjadi barang seperti halnya pakaian.
2. Kedua, tidak berlaku riba pada pertukaran atau jual beli antara emas dengan uang (harga). Hal ini dianalogikan seperti saat kita membeli baju dengan uang.

B. Relevansi Pandangan Ibnu Qayyim dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan fatwa terkait masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menetapkan bahwasannya hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (*mubah, jaiz*), selama emas tidak menjadi alat tukar resmi baik transaksi dilakukan melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah yaitu transaksi dimana penjual menekankan harga perolehan dengan keuntungan kepada pembeli. Batasan dan ketentuan fatwa ini pertama, selama jangka waktu perjanjian tidak boleh terdapat tambahan pada harga jual

(*tsaman*) meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Ketiga, emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjual belikan atau menjadi obyek pada akad lain yang dapat menimbulkan perpindahan kepemilikan.

Penetapan fatwa ini menggunakan penarikan kesimpulan (*istidlal*) berdasarkan Alquran, Hadis, Kaidah Ushul, Kaidah Fikih, dan Pendapat Ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) selanjutnya melakukan penggalan hukum terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai dalam Alquran dan Hadis, namun tidak ditemukan dalam nash Alquran secara spesifik yang menunjukkan kebolehan hukumnya. Sebaliknya ditemukan dalil yang menjelaskan ketentuan jual beli emas dalam Hadis Rasulullah SAW mengenai kebolehan transaksi tersebut namun dengan syarat penyerahannya harus dilakukan secara tunai. Kemudian MUI melakukan penggalan hukum melalui Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih berikut :

Kaidah Ushul

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum berputar (berlaku bersama ada atau tidak adanya illat”

Kaidah Fikih

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.”

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتَبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ،

...وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالْتَّقْوِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat ...”

مِنَ الدَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ

يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.”

Berdasarkan Kaidah-Kaidah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *urf* atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum yang berlaku sesuai dengan zaman. Kemudian DSN-MUI juga menggali Pendapat Para Ulama sebagai pertimbangan dalam penarikan hukumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan relevansi fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dengan pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap transaksi jual beli emas secara tidak tunai yakni adanya kesamaan dalam penentuan *'illat*. Keduanya memandang *'illat* pada emas yakni barang *sil'ah* bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

IV. KESIMPULAN

Uraian penelitian di atas dapat penulis simpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam menentukan hukum terkait jual beli emas secara tidak tunai menggunakan metode tersendiri. Pertama, beliau merujuk pada Alquran dan Sunnah, kemudian bila tidak ada nash yang jelas dalam Alquran dan sunnah beliau mengambil fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Terkadang beliau juga mengambil pendapat para imam fikih. Dalam kondisi demikian, Ibnu Qayyim akan mengambil pendapat yang paling dekat dengan Alquran dan Sunnah meskipun pendapat tersebut tidak sesuai dengan mazhab fikihnya. Dengan metode inilah terjadi ikatan yang kuat antar fikih dengan Alquran dan Sunnah. Metode inilah yang menyelaraskan *ijtihad* dalam masalah-masalah fikih. Selain itu metode-metode *ijtihad* yang digunakan Ibnu Qayyim dalam penggalian hukum yang belum ada sebelumnya yaitu menggunakan metode *ijma*, *qiyas*, masalah *mursalah*, *istishab*, *urf* dan *az-zari'ah*. Metode *ijtihad istihsan* tidak termasuk dalam metode yang digunakan Ibnu Qayyim karena dalam pandangannya metode tersebut hanya menyandarkan daya pikir tanpa dilandasi dengan dalil syara'. Sedangkan dalam penggunaan metode *ijma* beliau sependapat dengan Imam Syafi'i yang mana beliau berpendapat bahwa *ijma* yang dapat dijadikan sumber hukum hanya *ijma para sahabat*.
2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memiliki pandangan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh. Karena saat ini emas bukan merupakan alat tukar. Namun emas saat ini merupakan barang.
3. DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai didalamnya tercantum bahwasannya hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (*mubah, jaiz*) baik transaksi dilakukan melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*. Selama emas tidak menjadi alat tukar resmi. Batasan dan ketentuan fatwa ini pertama, selama jangka waktu perjanjian tidak boleh terdapat tambahan pada harga jual (*tsaman*) meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Ketiga, emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjual belikan atau menjadi obyek pada akad lain yang dapat menimbulkan perpindahan kepemilikan. Relevansi antara pandangan Ibnu Qayyim terhadap penetapan hukum jual beli emas secara tidak tunai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai adanya kesamaan penentuan illat.

V. SARAN

Berdasarkan uraian dan simpulan di atas dapat diketahui bagaimana pandangan Ibnu Qayyim terkait kebolehan jual beli emas secara tidak tunai dan bagaimana metode penetapan hukum yang beliau gunakan. Pandangannya Ibnu Qayyim juga menjadi landasan fatwa DSNMUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Penulis ingin mengemukakan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hendaknya penelitian ini memberikan pengetahuan bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi para tokoh masyarakat, akademisi, lembaga Islam dan masyarakat muslim pada umumnya tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sehingga masyarakat tidak perlu merasa cemas jika ingin melakukan transaksi jual beli emas baik untuk perhiasan maupun emas batangan, dimana pembayaran dilakukan secara tidak tunai yang kini telah disediakan beberapa Lembaga Keuangan Syariah.
2. Hendaknya penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan hukum jual beli emas secara tidak tunai mengingat penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Mesir: Al-Mansuroh, 2010)
- [2] Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Muwaqqi'in An-Rabb Al-'Alamin* (Bairut: Dar al-Fikr)
- [3] ———, *I'lam Muwaqqi'in An Rabbil Alamin (Panduan Hukum Islam)*, ed. by Abu Faiq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018)
- [4] Basri, Rusdaya, 'Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial', *Al-Manahij*, Vol. IX No (2015), 196
- [5] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta: Al Huda, 2002)
- [6] DSN-MUI, 'FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI', 51, 2010
- [7] Hamzah, Imron, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)', 2018
- [8] Apriliyani, Sri., Malik, Zaini Abdul., Surahman, Maman. *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 7-12.